

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah daerah sangat menentukan bagaimana arah pengembangan daerah tersebut karena didalamnya telah dipertimbangkan apa saja yang akan menjadi fokus dan prioritas yang diambil oleh pemerintah dalam pengembangan daerahnya dengan memperhatikan potensi dan kekurangan yang dimiliki, dan bagaimana cara atau strategi untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga menjadi terasa manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan yaitu RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025, RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015, dan RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029 pengembangan sektor industri batik menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah Kota Pekalongan dengan melihat besarnya potensi yang terdapat didalamnya.

Kota Pekalongan dikenal sebagai “Kota Batik”, menurut Surat Keputusan Walikota Pekalongan No.530/216 Tahun 2006 tentang produk unggulan Kota Pekalongan, menetapkan bahwa produk unggulan Kota Pekalongan adalah komoditas batik, konveksi, pertenunan alat tenun bukan mesin (ATBM), kerajinan enceng gondok, serat alam, dan pertenunan mesin, hal ini dikarenakan Kota Pekalongan mempunyai potensi besar dalam sektor industri batik dan telah berkembang begitu pesat, baik dalam skala kecil maupun besar, hasil produksi batik Pekalongan juga menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Pekalongan. Industri batik di Kota Pekalongan menjadi sangat potensial untuk dikembangkan karena total 70% produksi batik nasional dilakukan di Kota Pekalongan, batik merupakan kekuatan besar bagi perekonomian Kota Pekalongan, batik telah memberikan multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di Kota Pekalongan khususnya perdagangan, perindustrian, jasa, dan pariwisata. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan sektor yang menjadi penyokong ekonomi Kota Pekalongan dan memiliki andil besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah, pengembangan sektor batik juga sangat didukung oleh berbagai event baik yang berskala nasional maupun internasional, keberadaan museum batik, pasar grosir batik, dan ratusan outlet batik sebagai sarana pemasaran pendukung industri batik di Kota Pekalongan. Banyak industri batik juga tersebar di kampung-kampung batik di penjuru Kota Pekalongan dengan berbagai skala baik skala rumah tangga kecil hingga industri skala besar.

Selain menjadi fokus kebijakan pemerintah potensi pengembangan industri batik tersebut juga menginspirasi dan menjadi dasar penciptaan *branding* Kota Pekalongan dengan *tagline* “*Pekalongan World City of Batik*” pada saat ulang tahun kota ke 105 tanggal 1 April 2011.

Penciptaan *branding* Kota Pekalongan merupakan langkah strategis walikota dr. HM Basyir Ahmad di masa jabatan keduanya (2010-2015) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produk unggulan kotanya, kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJM 2010-2015). Munculnya kebijakan ini dilatarbelakangi dari kesadaran pemerintah terhadap persaingan antar kota yang semakin ketat dalam menarik perhatian investor, SDM potensial, dan wisatawan. Dalam hal implementasi, program yang dilakukan dalam rangka pemasaran, pelestarian, dukungan, dan peningkatan produktivitas batik sebagai *branding* Kota Pekalongan telah berjalan sinergis dengan program strategi yang ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD, RTRW, dan Renstra SKPD Kota Pekalongan.

Potensi sektor industri batik di Kota Pekalongan memiliki keunggulan dibanding daerah penghasil batik lainnya dilihat dari jumlah unit usaha batik yang ada terutama dengan dua kota penghasil batik terdekat yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

TABEL I.1
USAHA BATIK DI JAWA TENGAH & DIY TAHUN 2015

No	Industri Batik	Jml Unit Usaha Batik
1	Surakarta	118
2	Yogyakarta	299
3	Pekalongan	1077

Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Tengah & DIY, 2016

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Pekalongan mempunyai jumlah unit usaha batik paling banyak dibandingkan dengan Surakarta dan Yogyakarta yang menjadi keunggulan tersendiri dalam hal kuantitas produksi batik yang dihasilkan. Industri batik memberi sumbangan yang besar terhadap kemajuan perekonomian di Pekalongan terutama dari industri rumahan, Kota Pekalongan memiliki 1077 industri batik yang tersebar di 17 kelurahan sentra batik (dari 47 kelurahan) dengan daya serap sebanyak 12.690 tenaga kerja dari total 298.595 penduduk (BPS Kota Pekalongan, 2015). Dari Tabel 1.2 bisa dilihat bahwa mayoritas penduduk Pekalongan bergantung pada batik untuk pemenuhan kebutuhannya dibandingkan dengan sektor perindustrian yang lainnya.

TABEL I.2
DATA IKM (INDUSTRI KECIL MENENGAH) PRODUK UNGGULAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. Juta)
Batik	1077	12.690	47.729,362
Pakaian jadi	369	3.665	13.569,163
Pembekuan ikan	6	50	406,2
Pengalengan ikan dan biota perairanlainnya	1	396	11.500
Pengasapan ikan dan biota perairan lainnya	5	10	13.45
Penggaraman/pengeringan ikan	23	664	1.051,106
Pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya	21	620	7.279,025
Pengolahan teh dan kopi	37	1.736	10.156,3549
Pertenunan	1	29	597,24
Pertenunan ATBM	114	2.165	5.291,817
Pertenunan ATM	16	1.768	25.662,057

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2016

Selain itu dibawah ini adalah nilai produksi batik Kota Pekalongan yang dijabarkan pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

TABEL I.3
NILAI PRODUKSI BATIK KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009-2015

Tahun	Nilai Produksi
2009	Rp. 119.467,789 Juta
2010	Rp.114.980,906 Juta
2011	Rp.115.220,906 Juta
2012	Rp.120,049,386 Juta
2013	Rp.252.561,73 Juta
2014	Rp.284.797,53 Juta
2015	Rp. 669.295,78 Juta

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan, 2016

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat nilai produksi batik di Kota Pekalongan sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.486, 883 Juta atau 3,75% dibanding nilai produksi tahun

2009, namun selanjutnya selalu meningkat dari tahun ke tahun terutama setelah adanya realisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah berupa RTRW Kota Pekalongan 2009-2029 yang berlaku aktif pada tahun 2011 dan RPJM Kota Pekalongan 2010-2015 yang berkaitan dengan visi Kota Pekalongan Sebagai Kota Batik, pada tahun 2010 nilai produksi batik Kota Pekalongan yang hanya sebesar Rp. 114.980,906 Juta kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp. 252.561,73 Juta pada tahun 2013 dan meningkat lagi hingga mencapai Rp. 669.295,78 Juta di tahun 2015.

TABEL I.4
INDIKATOR KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN 2005-2015

Tahun	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (ribuan)	Angka Kemiskinan (%)	Kedalaman Kemiskinan (P1)	Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Angka kemiskinan nasional (%)
2005	26,3	9,90	1,30	0,27	95,947	15,97
2006	20,7	7,64	0,81	0,13	108,653	17,75
2007	17,5	6,37	1,27	0,29	136,266	16,58
2008	19,9	7,38	1,25	0,30	144,066	15,40
2009	17,9	6,62	0,87	0,19	151,517	14,15
2010	27,0	9,36	1,03	0,18	223,167	13,33
2011	27,8	10,04	0,93	0,17	231,876	12,49
2012	28,1	9,44	1,12	0,21	234,453	11,96
2013	26,9	9,03	1,17	0,15	235,897	11,47
2014	24,6	8,26	0,72	0,13	242,007	10,96
2015	23,1	7,74	0,81	0,21	250,665	11,22

Sumber: BPS Kota Pekalongan, Berbagai Tahun Penerbitan

Tabel 1.4 menunjukkan kondisi kemiskinan di Kota Pekalongan cukup fluktuatif dan persentase angka kemiskinan meningkat cukup signifikan dari tahun 2009 ke tahun 2010 berbanding lurus dengan menurunnya nilai produksi sektor industri batik sebagai sektor utama bagi perekonomian Kota Pekalongan pada tahun tersebut. Sebagai produk unggulan utama menurunnya sektor industri batik dapat mempengaruhi kesejahteraan pelakunya dan masyarakat Kota Pekalongan pada umumnya. Namun, seiring dengan peningkatan hasil produksi batik mulai tahun 2011 hingga 2015 tingkat kemiskinan cenderung menurun dan selalu berada dibawah angka tingkat kemiskinan nasional. Dengan adanya fokus kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor

industri batik mampu memberikan pengaruh positif bagi sektor tersebut, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Kota Pekalongan dengan batik sebagai penggerak ekonomi utama.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari berbagai kebijakan sektor utama yang ingin dikembangkan di Kota Pekalongan adalah sektor industri batik terutama dengan makin meningkatnya pendapatan pemerintah dan peningkatan perekonomian masyarakat yang diperoleh dari sektor tersebut didukung dengan berbagai event dan *branding* Kota Pekalongan sebagai *World City Of Batik* yang semakin menegaskan identitas Kota Pekalongan sebagai kota batik.

Penelitian ini sebagai kajian lebih lanjut untuk melihat apakah strategi pengembangan industri batik sebagai produk unggulan utama di Kota Pekalongan seperti yang tertuang dalam RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025, RTRW Kota Pekalongan 2009-2029 dan RPJM Kota Pekalongan 2010-2015 sesuai SK Walikota Pekalongan No. 530/216 Tahun 2006 berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan khususnya mereka para pelaku industri batik tersebut, karena saat terjadi penurunan nilai produksi batik angka kemiskinan di Kota Pekalongan juga cenderung meningkat pada data ditahun yang sama. Oleh karena itu, dari pemaparan diatas penulis mengangkat penelitian tentang pengaruh kebijakan pemerintah di sektor batik terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan **“Bagaimana Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan?”**. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi kesejahteraan para pelaku industri batik yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dilaksanakan pemerintah tentang pengembangan sektor industri batik, dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Pekalongan tentang pengembangan sektor industri batik sebagai produk unggulan utama terbukti memberikan pengaruh pada kondisi kesejahteraan pelaku dari sektor tersebut.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari penelitian ini:

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah di sektor batik terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi pelaku industri batik.
2. Mengidentifikasi sejarah perkembangan industri batik di Kota Pekalongan.
3. Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Kota Pekalongan tentang pengembangan sektor industri batik.
4. Mengidentifikasi tingkat kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan.
5. Mengidentifikasi pengaruh kegiatan industri batik terhadap kesejahteraan.
6. Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah di sektor batik terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan.
7. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

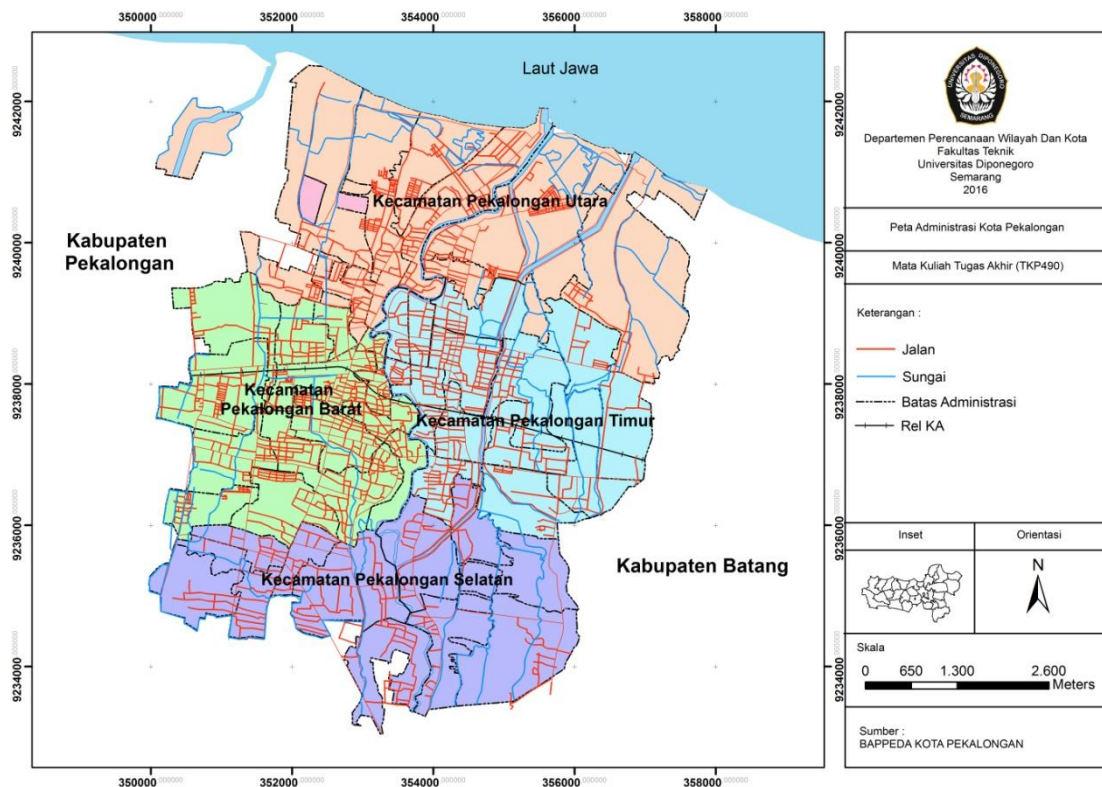
1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup lokasi penelitian dan ruang lingkup substansi penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi Penelitian

Ruang lingkup lokasi pada penelitian ini adalah kampung-kampung batik yang tersebar di penjuru Kota Pekalongan, dengan demikian penelitian yang dilakukan mampu menggambarkan secara menyeluruh pengaruh kebijakan pemerintah tentang pengembangan industri batik terhadap tingkat kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan. Secara administratif Kota Pekalongan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Sebelah Utara berbatasan dengan | : Laut Jawa |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : Kabupaten Batang |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : Kabupaten Pekalongan |



Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2016

Gambar 1.1
Peta Kota Pekalongan

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi Penelitian

Ruang lingkup substansi penelitian digunakan untuk membatasi substansi yang digunakan dalam pembahasan. Penelitian ini mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan pelaku industri batik, sehingga ruang lingkup substansi pada penelitian ini adalah materi tentang kebijakan, kesejahteraan, batik, pengaruh, dan Kota Pekalongan. Adapun batasan materi dalam penelitian ini adalah materi mengenai kondisi kesejahteraan pelaku industri batik, batik Pekalongan, dan tentang materi kebijakan pemerintah Kota Pekalongan di sektor batik serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari kajian ini yaitu dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan dalam mengembangkan potensi daerahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai referensi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Bagaimana Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan ini memiliki kesamaan tema besar dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu kesejahteraan masyarakat. Namun apabila dilakukan perbandingan, substansi dari penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengaruh fokus kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor industri batik terhadap kesejahteraan pelaku industri batik tersebut.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

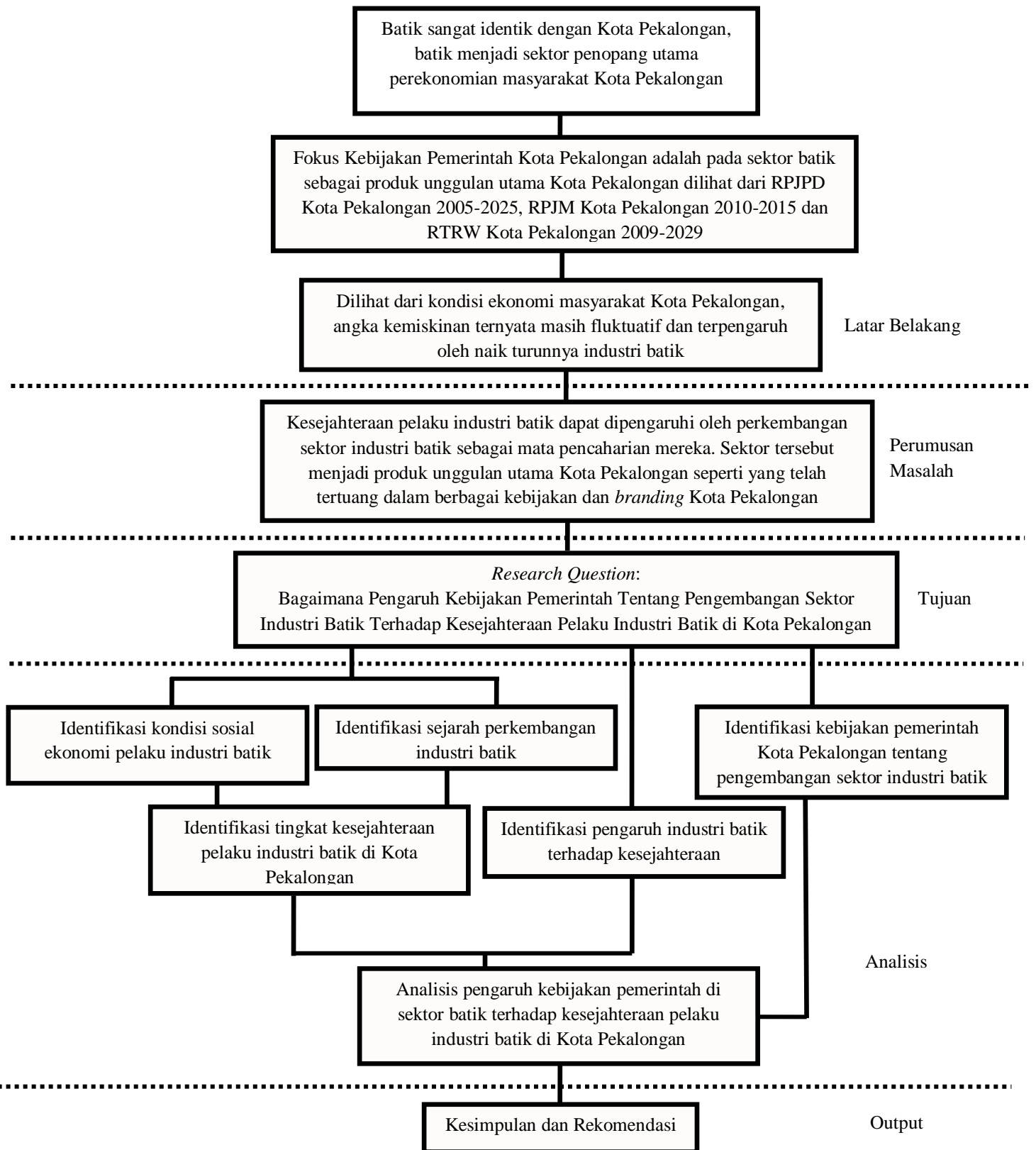
**TABEL I.5
KEASLIAN PENELITIAN**

NO	PENELITI	JUDUL	LOKASI	TUJUAN	METODE	HASIL
1	MC. Khuzaironi	Pengaruh kebijaksanaan apbd dan Kemiskinan terhadap kesejahteraan Masyarakat di provinsi jawa tengah	Provinsi Jawa Tengah	Menganalisis pengaruh kebijaksanaan fiskal (APBD) yang terdiri dari kapasitas fiskal, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah serta kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2009-2013	Model efek acak (random effect model), dan menggunakan jenis data sekunder	Kapasitas fiskal, alokasi belanja modal, pembiayaan daerah dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat
2	Erwin Dakularak	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Di provinsi bali	Provinsi Bali	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, baik secara simultan maupun secara parsial	Kuantitatif menggunakan sampling jenuh karena seluruh populasi digunakan sebagai sampel	Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkadang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya sehingga menimbulkan menurunnya kesejahteraan masyarakat

3	Lilian Sarah Hiariey	Dampak pariwisata terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di kawasan wisata pantai natsepa, pulau ambon	Kawasan wisata pantai natsepa, pulau ambon	(1) mengidentifikasi usaha yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa, (3) menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat yang menggunakan jasa objek wisata pantai Natsepa	Kuantitatif (Kuesioner, wawancara, dan pengumpulan data sekunder)	Berdasarkan tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga yang memanfaatkan jasa objek wisata pantai Natsepa mempunyai tingkat kesejahteraan sedang yaitu persentase sebesar 75%, kemudian tingkat kesejahteraan tinggi dengan persentase sebesar 22% dan yang terkecil yaitu tingkat kesejahteraan rendah dengan persentase sebesar 3%.
4	Ricko Ardhian Hermanto	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	Menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan	Kuantitatif (Kuesioner, wawancara, dan pengumpulan data sekunder)	Ditemukan fakta bahwa sebagian besar pelaku industri batik telah memiliki tingkat kesejahteraan sedang yaitu sebanyak 78% dan tingkat kesejahteraan tinggi sebanyak 22%. Adanya perubahan yang signifikan pada kondisi kesejahteraan mereka terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu menurut para pelaku industri batik kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan tersebut, terbukti setelah pelaksanaan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor batik sebagai produk unggulan utama Kota Pekalongan pada kurun waktu 5 tahun terakhir.

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

1.7 Kerangka Pikir



Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Gambar 1.2
Kerangka Pikir Penelitian

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah di sektor batik terhadap tingkat kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kuantitatif, metode ini menuntut peneliti memiliki bekal teori yang cukup luas sehingga mampu menjadi *human instrumen* yang baik (Sugiyono, 2008). Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab *research question* dan sasaran analisis pengaruh kebijakan pemerintah di sektor batik terhadap tingkat kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan.

1.9 Pendekatan Penelitian

Kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan mata pencaharian mereka karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan yang mereka terima, melihat bagaimana batik sebagai sektor potensial di Kota Pekalongan berkembang sangat pesat belakangan ini didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah yang menjadikan batik sebagai komoditi utama dapat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan terutama mereka para pelaku industri batik, dengan berkembangnya sektor yang menjadi mata pencaharian mereka dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan yang mereka miliki. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Kota Pekalongan di sektor batik mempengaruhi kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu kesejahteraan pelaku industri batik dan kebijakan pemerintah serta pengaruhnya dalam kondisi kesejahteraan tersebut.

1.10 Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal-hal yang diteliti yang terdiri dari apa dan siapa yang telah diteliti. Pada penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah pengaruh kebijakan pemerintah Kota Pekalongan di sektor batik terhadap kesejahteraan pelaku industri batik. Oleh karena itu, yang menjadi obyek materi pada penelitian ini adalah variabel-variabel yang telah ditentukan yaitu tingkat kesejahteraan, pengaruh industri batik terhadap kesejahteraan, dan bentuk kebijakan yang dilaksanakan pemerintah serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan pelaku industri batik.

Selain obyek materi, juga terdapat obyek penelitian berupa manusia. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah pelaku industri batik. Pelaku industri batik disini adalah mereka dengan mata pencaharian yang memiliki hubungan langsung dengan sektor industri batik baik produksi maupun pemasaran, apakah mereka pemilik (juragan), pedagang, atau para pekerja (buruh) dalam konteks wilayah di Kota Pekalongan, karena pengaruh yang dirasakan berbeda tergantung karakteristik pelaku industri batik itu sendiri.

1.11 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kuantitatif adalah penyebaran form kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk *time series* yang bersifat kuantitatif atau data yang berbentuk angka-angka yang diperoleh dari instansi terkait di Kota Pekalongan maupun hasil dari penyebaran kuesioner terhadap pelaku industri batik di Kota Pekalongan. Adapun cara pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi lapangan. Kuesioner berupa pertanyaan yang bersifat tertutup yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili variabel penelitian. Pada kuesioner bersifat pertanyaan tertutup karena telah disediakan jawaban yang memiliki skala penilaian. Kuesioner ini ditujukan kepada pelaku industri batik di Kota Pekalongan sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dengan opsi pertanyaan yang lebih terbuka. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengobservasi kondisi kesejaheraan dan didokumentasikan berupa foto yang cukup untuk menggambarkan kondisi di wilayah penelitian.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari survei instansi dan kajian dokumen. Survei instansi ditujukan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, BP2MPT Kota Pekalongan, Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, Koperasi Batik Setono, dan Museum Batik Pekalongan. Kajian dokumen yaitu mengkaji dokumen yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang. Selain itu data sekunder didapatkan dari kajian kebijakan terkait pengembangan industri batik di Kota Pekalongan. Pada pengumpulan data sekunder ini juga dilakukan interview atau wawancara dasar kepada instansi yang terkait.

1.12 Teknik Sampling

Teknik sampling yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jenis sampling dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian pengaruh kebijakan pemerintah di sektor batik terhadap kesejaheraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan ini digunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85) pada penelitian ini digunakan teknik *Purposive Sampling* dengan pertimbangan karena yang menjadi objek penelitian adalah hanya para pelaku industri batik baik

pemilik (juragan), pengrajin (buruh), dan pedagang bukan keseluruhan populasi. Setelah penyebaran kuesioner dilakukan apabila dirasa memang membutuhkan informasi tambahan maka dilakukan wawancara. Teknik yang digunakan dalam wawancara untuk penelitian ini adalah teknik bola salju (*snowballing*). *Snowball Sampling* digunakan apabila data atau hasil wawancara tersebut membutuhkan pendetailan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat melengkapi data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2008: 85). Dalam teknik wawancara responden yang terpilih adalah yang memiliki pengetahuan lebih tentang industri batik, kebijakan pemerintah tentang industri batik, dan segala sesuatu yang berhubungan di dalamnya.

Untuk mempermudah dalam menyebarkan kuesioner penelitian, karena jumlah populasi yang sangat besar maka diperlukan penarikan jumlah sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Dari berbagai rumus yang ada, terdapat sebuah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel yaitu rumus Slovin (Consuelo, 1993) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = toleransi kesalahan dalam menetapkan sampel maksimal 10% (0.1)

Berdasarkan data Disperindagkop UMKM Kota Pekalongan tahun 2015 jumlah pelaku industri batik di Kota Pekalongan sebanyak 12.690 orang. Maka jumlah sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$N = \frac{12690}{1 + 12690(0,1)^2} = 99$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas sampel kuesioner yang dihasilkan adalah 99 digenapkan menjadi 100 sampel. Sejumlah 100 sampel kuesioner tersebut disebar di Kota Pekalongan secara keseluruhan pada sentra-sentra industri batik.

1.12.1 Kriteria Sampel

Objek yang menjadi sasaran utama penelitian ini adalah pelaku industri batik di Kota Pekalongan. Sampel yang digunakan sebagai narasumber sebaiknya memenuhi kriteria, memahami

sesuatu karena terlibat langsung di dalamnya (Sugiyono, 2005:146). Dalam penelitian ini sampel yang diambil antara lain adalah pelaku industri batik baik juragan, pengrajin, buruh atau pedagang. Sampel yang telah ditentukan digunakan sebagai dasar untuk kuesioner yang disebar untuk mencari data-data primer terkait penelitian. Berikut adalah kriteria narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

TABEL I.6
KRITERIA NARASUMBER

No.	Kriteria	Dasar Pertimbangan
1.	Usia 17-65 tahun	Usia tersebut termasuk dalam masa dewasa sehingga pola berpikirnya akan lebih baik.
2.	Tokoh masyarakat dan stakeholder terkait yang mengetahui tentang perkembangan industri batik dan kebijakan pemerintah	Memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai perkembangan industri batik dan kebijakan pemerintah tentang pengembangan industri batik di Kota Pekalongan

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2016

1.13 Teknik Pengolahan Data

Dalam mengelola data yang didapatkan dari hasil survei, digunakan analisis skoring dan frekuensi serta analisis kuantitatif deskriptif. Skoring adalah suatu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen (Djaali & Mulyono, 2004), dari pengertian tersebut skoring juga dapat diartikan dengan kegiatan memberi angka berdasarkan jawaban-jawaban dari kuesioner yang responden isi. Skor tersebut kemudian diberi nilai dengan menggunakan pendekatan skala *Likert*. Skala *Likert* menurut Sugiyono (2012) adalah suatu skala perametriik yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian, variabel dalam penelitian ini adalah kesejahteraan. Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari positif sampai negatif, untuk jawaban positif diberi skor 3, kemudian 2, dan skor 1 untuk jawaban dengan nilai paling negatif. Kemudian penggunaan analisis frekuensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase jawaban terhadap total jumlah sampel, untuk kemudian mampu menggambarkan kondisi riil dari hipotesis yang telah dibuat sebelumnya yang dituangkan dalam pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner.

Kemudian analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk membaca data kuantitatif yang telah didapatkan dari hasil kuesioner pelaku industri batik di Kota Pekalongan, lalu dari beberapa variabel yang ada untuk melihat hubungan antar variabel tersebut digunakan analisis tabulasi silang (*Crosstab*), analisis tabulasi silang merupakan salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel yang disajikan dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom (Santoso dan Ciptono, 2001) sehingga analisis tabulasi silang ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan dua variabel atau lebih apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dan jika terbukti memiliki hubungan yang signifikan seberapa kuat hubungan tersebut. Dari hasil analisis tersebut kemudian diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan pelaku industri batik di Kota Pekalongan.

1.14 Variabel Penelitian

Berdasarkan kajian literatur yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa variabel penelitian yang mampu membantu dalam melakukan penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

TABEL I.7
VARIABEL UNTUK MELIHAT TINGKAT KESEJAHTERAAN

No	Variabel	Indikator	Parameter	Skor
1	Ekonomi	Pendapatan	Tinggi (>Rp.5.000.000,-)	3
			Sedang (Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000)	2
			Rendah (<Rp. 2.000.000,-)	1
		Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga	Tinggi (>Rp.5.000.000,-)	3
			Sedang (Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000,)	2
			Rendah (<Rp. 2.000.000,-)	1
2	Kondisi Rumah Tinggal	Keadaan tempat tinggal	Permanen	3
			Semi-Permanen	2
			Non-Permanen	1
		Fasilitas tempat tinggal	Lengkap	3
			Cukup	2
			Kurang	1

3	Kesehatan	Kesehatan anggota keluarga	Bagus (<25% sering sakit)	3
			Cukup (25%-50% sering sakit)	2
			Kurang (>50% sering sakit)	1
		Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan	Mudah	3
			Cukup sulit	2
			Sulit	1
4	Pendidikan	Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan	Mudah	3
			Cukup sulit	2
			Sulit	1
5	Utilitas	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi	Mudah	3
			Cukup sulit	2
			Sulit	1

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2016

Menurut Sugiharto (2006) Kriteria untuk masing-masing klasifikasi sebagai berikut:

- Tingkat kesejahteraan tinggi : nilai skor 20-24
- Tingkat kesejahteraan sedang : nilai skor 14-19
- Tingkat kesejahteraan rendah : nilai skor 8-13

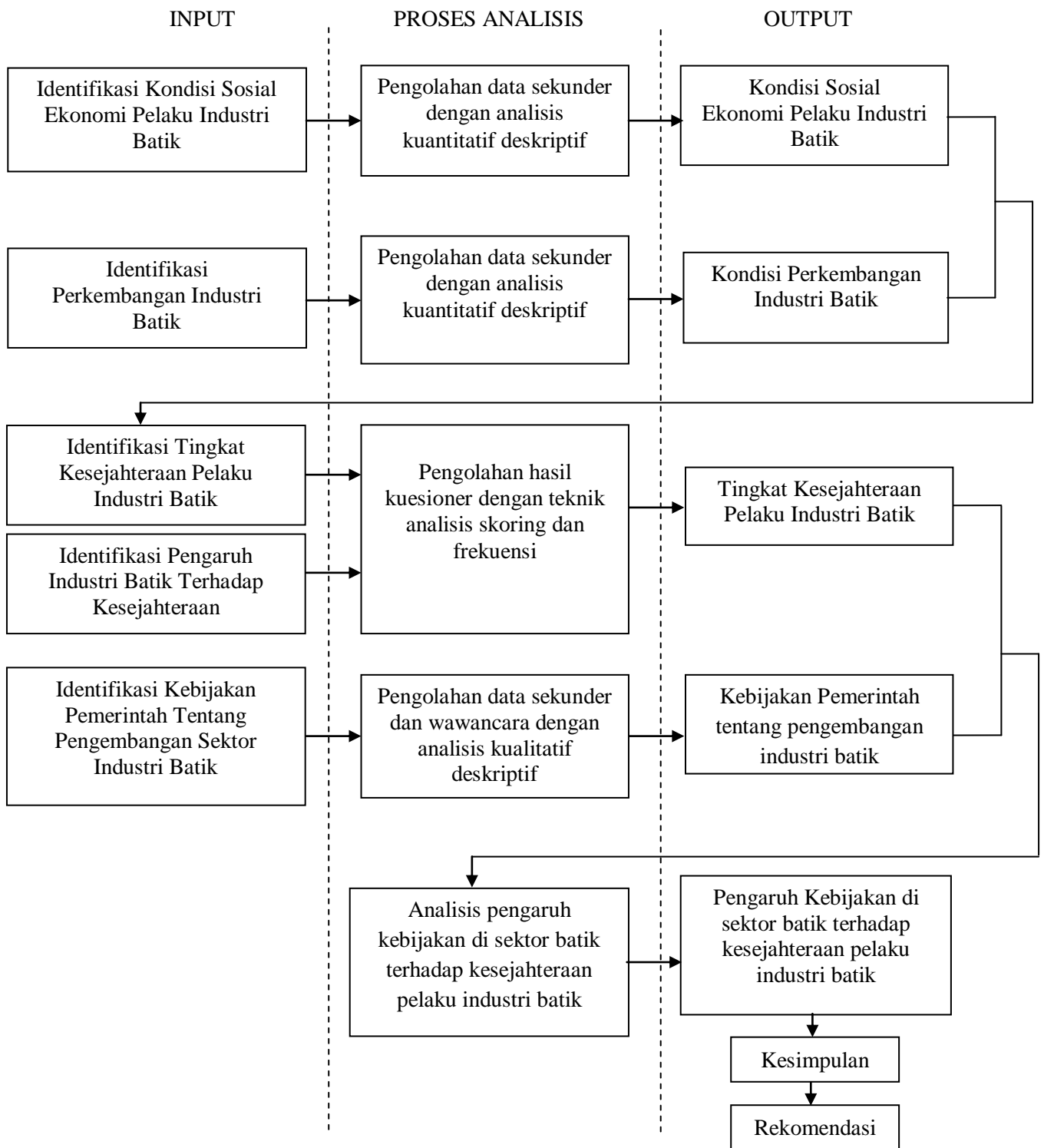
TABEL I.8
VARIABEL UNTUK MELIHAT PENGARUH
INDUSTRI BATIK TERHADAP KESEJAHTERAAN

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Hubungan Dengan Industri Batik	Bekerja di Bidang Industri Batik	Sebagai Pengusaha
			Sebagai Pedagang
			Sebagai Buruh
		Lama Bekerja di Bidang Industri Batik	Sudah bekerja selama >20th
			Sudah bekerja antara 10-20th
			Baru bekerja selama < 10th
2	Hubungan Industri Batik Dengan Kesejahteraan	Perubahan Penghasilan/ Kondisi Kesejahteraan Setelah Menekuni Industri Batik	Lebih Baik Sekarang
			Sama Saja
			Lebih Baik Dulu Sebelum Bekerja di Industri Batik

Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2016

1.15 Kerangka Analisis

Analisis data merupakan salah satu proses pengolahan data untuk menghasilkan output penelitian. Analisis data dilakukan berdasarkan dengan sasaran yang telah dicapai. Kerangka analisis ini menunjukkan gambaran proses analisis yang telah dilakukan, yaitu mulai dari input, proses dan output. Input analisis merupakan data-data yang didapatkan saat melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian pada proses, data tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis yang sesuai dan hasil dari proses ini adalah suatu output. Adapun kerangka analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Gambar 1.3
Kerangka Analisis

1.16 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik di Pekalongan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang pemikiran, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup materi, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini membahas mengenai kesejahteraan, batik di Kota Pekalongan dan sejarah perkembangannya, serta Kota Pekalongan dilihat dari kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam pengembangan industri batik menurut teori dari hasil telaah dokumen dan literatur serta pendapat para ahli.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN DAN INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN

Merupakan gambaran umum Kota Pekalongan dan industri batik di Kota Pekalongan. Gambaran tersebut berupa kondisi sosial ekonomi Kota Pekalongan, infrastruktur dan fasilitas umum di Kota Pekalongan, serta kondisi kebijakan pemerintah dan industri batik di Kota Pekalongan.

BAB IV ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI SEKTOR BATIK TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU INDUSTRI BATIK

Bab ini menjelaskan tentang kondisi sosial ekonomi pelaku industri batik, perkembangan industri batik di Kota Pekalongan, tingkat kesejahteraan pelaku industri batik, pengaruh industri batik terhadap kesejahteraan, kebijakan pemerintah Kota Pekalongan tentang pengembangan industri batik, dan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan pelaku industri batik.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Pengaruh Kebijakan Pemerintah di Sektor Batik Terhadap Kesejahteraan Pelaku Industri Batik dan berisi rekomendasi dari hasil penelitian terhadap pemerintah Kota Pekalongan dan Pelaku Industri Batik di Kota Pekalongan.